

Tabel 7.1
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017

Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPK Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
MISI I : Mewujudkan implementasi Syariat Islam secara Kaffah							
Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam sendi kehidupan masyarakat	Peningkatan syiar Islam dan kegiatan keagamaan dalam upaya penguatan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam setiap kehidupan bermasyarakat	Terlaksananya kegiatan bimbingan, tausyiah, dan ceramah agama	100%	100%	Program Pelayanan Keagamaan	Wajib	Setdakab
		Meningkatnya pelayanan keagamaan	65%	100%	Program Pelayanan Keagamaan	Wajib	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan WH
		Terlaksananya peringatan hari besar Islam			Program Peringatan Hari Besar Islam	Wajib	Dinas Syariat Islam
	Peningkatan sosialisasi dan penguatan pelaksanaan qanun-qanun Syariat Islam	Terlaksananya sosialisasi qanun-qanun Syariat bagi seluruh elemen masyarakat	-	100%		Wajib	Dinas Syariat Islam

Meningkatnya peran MPU dan ulama dalam pembinaan umat dan penegakan Syariat Islam secara kaffah	Penguatan fungsi dan peran MPU/ulama dalam setiap perumusan kebijakan pembangunan yang berkenaan dengan keagamaan dan sosial kemasyarakatan, pembinaan umat, serta merespon secara cepat berbagai isu-isu dan dinamika pelaksanaan Syariat Islam	Persentase kegiatan MPU yang mendukung penegakan Syariat Islam	-	100%	Program Pelayanan Keagamaan	Wajib	MPU
		Terlaksananya muzakharah ulama yang berkontribusi signifikan terhadap penegakan Syariat Islam	-	100%	Program peningkatan Sumber Daya Kelembagaan Agama	Wajib	MPU

Meningkatnya kapasitas dan fungsi dayah dan Wilayatul Hisbah dalam mengawasi, mengaktualisasikan, dan mengimplementasikan nilai-nilai Islami dalam mendorong penegakan Syariat Islam	Penguatan kapasitas wilayatul hisbah dan lembaga sosial keagamaan dalam mengawasi dan menyahuti dinamika dalam kehidupan masyarakat yang bertentangan nilai-nilai Islami melalui kerjasama yang harmonis dan melibatkan secara aktif masyarakat dan dukungan penuh aparat penegak hukum.	Terlaksananya kegiatan pengawasan dan penegakan Syariat Islam	-	100%	Program Peningkatan dan Pengawasan Syariat Islam	Wajib	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan WH Setdakab
		Terciptanya ketertiban dan keamanan serta kepastian hukum dalam masyarakat	70%	100%	Program Peningkatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Wajib	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan WH
	Penguatan kelembagaan dayah dalam mengawasi dan menegakkan Syariat Islam secara kaffah	Persentase dayah yang dibina	100%	100%		Wajib	

Meningkatnya kualitas tempat ibadah dan kelembagaan keagamaan dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan dan sebagai sarana pembelajaran agama Islam	Penyediaan secara memadai dan berkesinambungan sarana dan prasarana keagamaan serta pemanfaatan secara optimal tempat peribadatan sebagai pemberdayaan umat yang beriman dan bertaqwa	Selesainya pembangunan Masjid Agung	-	100%	Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana Peribadatan	Wajib	Dinas Syariat Islam
		Meningkatnya kualitas sarana ibadah/pembelajaran agama	80%	100%	Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana Peribadatan	Wajib	Dinas Syariat Islam
		Terbangunnya pusat kajian Islam	-	100%	Peningkatan Pembangunan Islamic Center	Wajib	Dinas Syariat Islam

Terbinanya kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama serta antara umara dan ulama dalam mendukung percepatan pembangunan daerah	Penguatan hubungan yang harmonis antara ulama dan umara dalam mendorong percepatan pembangunan daerah serta meminimalisir pengaruh buruk globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta aliran/faham sesat yang dapat merusak akidah masyarakat	Meningkatnya koordinasi dan harmonisasi antara ulama dan umara	-	100%	Program Pelayanan Keagamaan	Wajib	Setdakab
Misi 2 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing							
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kesehatan dalam mendukung standar pelayanan minimal (SPM);	Percepatan peningkatan status RSUD Ujong Fatimah menjadi B+ dalam mewujudkan pelayanan kesehatan berkualitas	Meningkatnya Status RSUD Ujong Fatimah menjadi kelas B+	C	B+	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Wajib	RSUD
	Pembangunan rumah sakit Ibu dan Anak dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan pengurangan angka kematian ibu dan anak	Tersedianya rumah sakit Ibu dan Anak	-	100%	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Wajib	Dinas Kesehatan

Meningkatnya akses dan pemerataan kualitas pelayanan kesehatan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan akses dan pemerataan layanan kesehatan berkualitas sesuai dengan SPM Kesehatan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Angka harapan hidup (tahun)	69,87	71,96	Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Obat dan Pembekalan Kesehatan Program Peningkatan Cakupan K4	Wajib	Dinas Kesehatan
		Persentase Balita Gizi Buruk	0,9	0,4	Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	wajib	Dinas Kesehatan

	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan (RSUD, Puskesmas, pustu, dan jaringannya) secara bertahap	Rasio posyandu per 1000 balita	13,51	18,85	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Saranan dan Prasarana Puskesmas/Pustu	Wajib	Dinas Kesehatan
		Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 100.000 penduduk	0,75	1,45	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Saranan dan Prasarana Puskesmas/Pustu	Wajib	Dinas Kesehatan
		Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk	6,85	8,10	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Wajib	RSUD

Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi sumber daya kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan berkualitas	Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga medis/sumber daya manusia (SDM) bidang kesehatan secara bertahap yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah	Rasio dokter per 100.000 penduduk	0,34	2,04	Program Pemenuhan Tenaga Ahli Kesehatan Program Pengembangan Penyusunan Pola Remunerasi Bagi Dokter	Wajib	
		Rasio tenaga medis per 100.000 penduduk	3,01	8,01	Program Peningkatan Kompetensi	Wajib	Dinas Kesehatan RSUD
Terwujudnya pengelolaan dan manajemen kesehatan berbasis teknologi informasi	Peningkatan kualitas manajemen, sistem informasi, serta penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dan kesehatan masyarakat	Terlaksananya penerapan pengelolaan manajemen RSUD berbasis teknologi informasi	50%	80%	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Wajib	RSUD

Kabupaten Nagari Raya bebas dari penyakit menular tahun 2013	Peningkatan kampanye pola hidup sehat dan mencegah penyebaran penyakit menular yang didukung penuh seluruh elemen masyarakat	Terbebasnya Kabupaten Nagari Raya dari penyakit menular	-	100%	<p>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</p> <p>Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular</p> <p>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</p>	Wajib	Dinas Kesehatan
Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	<p>Perluasan layanan pendidikan non-formal yang bermutu dan berkualitas</p> <p>Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Atfal (TK/RA)</p>	Angka melek huruf (persen)	93	95	<p>Program Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun</p> <p>Program Pendidikan Menengah</p> <p>Program Pendidikan Non Formal</p>	Wajib	Dinas Pendidikan
		Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	8,9	12	<p>Program Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun</p> <p>Program Pendidikan Menengah</p> <p>Program Pendidikan Non Formal</p>	Wajib	Dinas Pendidikan

Meningkatnya akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu dan berkualitas	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan secara bertahap sesuai SPM pendidikan dalam upaya mendorong peningkatan mutu pendidikan	APK SD/MI/ Paket A (persen)	124,08	145,13	Program Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun Program Penanganan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Wajib	Dinas Pendidikan
	Peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan standar nasional	APK SMP/MTs/ Paket B (persen)	96,94	99,25	Program Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun		
		APK SMA/MA/ Paket C (persen)	86,16	92,67	Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal		
Meningkatnya kompetensi guru serta tenaga kependidikan dalam mendorong peningkatan pelayanan pendidikan berkualitas	Peningkatan kompetensi dan profesionalitas tenaga pendidik/guru dan tenaga kependidikan, melalui kelanjutan pendidikan, pelatihan, lokakarya, studi banding, magang, dan lain sebagainya, diharapkan menjadi umpan balik terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Nagan Raya	Persentase guru yang berijazah S1/D-IV	58,30	68,30	Program Penanganan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Wajib	Dinas Pendidikan

		Persentase guru yang bersertifikasi			Program Penanganan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan		
Tersedianya secara memadai sarana dan prasarana pendidikan di setiap strata pendidikan sesuai standar pelayanan minimal (SPM)	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan secara bertahap sesuai SPM pendidikan dalam upaya mendorong peningkatan mutu pendidikan	Angka pendidikan yang ditamatkan SD/ sederajat (persen)	31,75	36,75	Program Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun		
		Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/ sederajat (persen)	23,95	24	Program Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun		
		Angka pendidikan yang ditamatkan SMA/ sederajat (persen)	18,53	23,53	Program Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah		
		Angka pendidikan yang ditamatkan DI/DII/DIII (persen)	5,15	6,75	Program Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun		
		Angka pendidikan yang ditamatkan DIV/S1 (persen)	4,80	5,30	Program Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun		

		Angka pendidikan yang ditamatkan S2/S3 (persen)	0,2	1,20	Program Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah		
		Angka pendidikan yang ditamatkan SLTP+ (persen)	52,63	60,78	Program Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun		
		APM SD/MI/ Paket A (persen)	89,07	93,02	Program Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun		
		APM SMP/MTs/ Paket B (persen)	70,07	75,92	Program Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun		
		APM SMA/MA/ Paket C (persen)	62,03	70,60	Program Pendidikan Non Formal		
Tersedianya tenaga kerja yang handal, profesional, dan berdaya saing tinggi	Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja guna terciptanya tenaga kerja yang handal dan profesional	Persentase penduduk yang bekerja	98,6	99,1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Wajib	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
MISI 3 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, dan Bertanggung jawab							

Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>good governance</i>)	Peningkatan kualitas pengelolaan kegiatan internal SKPK secara efektif dan efisien	Persentase realisasi pengelolaan kegiatan internal SKPK yang terkait dengan administrasi, SDM, dan sarana dan prasarana	Rata-rata 98%	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Wajib	Semua SKPK
Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan profesional	Pengelolaan keuangan daerah dan sistem pelaporan keuangan pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme yang didukung oleh pengembangan teknologi berbasis sistem informasi manajemen	Opini WTP atas laporan keuangan	WTP	WTP	1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Wajib	Sekretariat Daerah DPKKD Bappeda

	<p>Penyempurnaan dan revisi qanun-qanun PAD yang sesuai dengan potensi objek-objek PAD dan sesuai ketentuan perundangan</p> <p>Pemutakhiran data dan informasi objek PAD yang didukung penerapan teknologi informasi</p> <p>Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pemungutan PAD</p>	Target PAD	100%	100%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Wajib	DPKKD
Terwujudnya aparatur yang beretos kerja tinggi, profesional, dan disiplin dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah	Peningkatan kompetensi dan profesionalitas sumber daya aparatur guna memacu peningkatan kinerja dan pelayanan yang prima bagi kepentingan masyarakat	Persentase pelanggaran disiplin yang mendapat sanksi	100	100	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Wajib	Sekretariat Daerah
		Tersedianya aparatur yang handal	25%	100%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Wajib	BKPP

<p>Terwujudnya pengawasan pembangunan dan pengendalian yang efektif dan berkelanjutan</p>	<p>Pemberantasan praktik KKN dan penyalahgunaan wewenang sesuai ketentuan dan perundangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta mendorong penumbuhan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah</p>	<p>Persentase temuan yang ditindaklanjuti</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah</p>	<p>Wajib</p>	<p>Inspektorat</p>
<p>Meningkatnya kapasitas DPRK dalam menjalankan fungsi-fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan</p>	<p>Penguatan kapasitas DPRK dalam melaksanakan peran dan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah</p> <p>Peningkatan koordinasi yang intensif antara eksekutif dengan legislatif (DPRK), serta antarSKPK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah</p>	<p>Pengesahan APBK tepat waktu</p>	<p>Tepat waktu</p>	<p>Tepat Waktu</p>	<p>Program peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perwakilan Rakyat Daerah</p> <p>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</p>	<p>Wajib</p>	<p>DPRK, Bappeda, Sekretariat Daerah</p>

		Penetapan Qanun pertanggung jawaban APBK secara tepat waktu	Tepat waktu	Tepat Waktu	Program peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perwakilan Rakyat Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Wajib	DPRK, Bappeda, Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan profesionalisme, akuntabilitas, dan sistem kerja instansi dan aparat pemerintah daerah dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih (<i>good governance</i>) dan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas	Rata-rata lama pengurusan perizinan			Program Pengendalian dan Pengelolaan Perizinan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Investasi	Wajib	Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
		Kepemilikan KTP	83,7%	98,78%	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Wajib	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pemerintah	Baik	Baik	Program pengembangan data dan informasi	Wajib	Bappeda

Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, integratif, dan partisipatif serta didukung data/informasi pembangunan yang akurat	Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perencana, peningkatan kualitas data, dan penerapan teknologi komunikasi dan informasi guna menghasilkan perencanaan pembangunan berkualitas	Pelaksanaan musrenbang di tingkat kecamatan dan kabupaten yang tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Program perencanaan pembangunan daerah	Wajib	Bappeda
		Penjabaran program RPJM ke dalam RKPD	-	100%	Program perencanaan pembangunan daerah		
		Publikasi data/informasi pembangunan (Nagan Raya dalam Angka, PDRB) tepat waktu dan berkualitas	-	Tepat Waktu	Program pengembangan data dan informasi		
<p>MISI 4 : Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan berbasis pembangunan berkelanjutan</p>							

<p>Terkelolanya potensi pertumbuhan rakyat yang ramah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan serta berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat</p>	<p>Peningkatan pengelolaan potensi pertumbuhan rakyat yang ramah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan</p>	<p>Target realisasi kontribusi pertumbuhan terhadap PAD</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan</p> <p>Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan</p>	<p>Pilihan</p>	<p>Dinas Pertambangan dan Energi</p>
<p>Terkelolanya objek-objek wisata dan berkembangnya destinasi pariwisata yang sesuai dengan budaya lokal dan mengedepankan nilai-nilai Islami</p>	<p>Pengembangan objek dan daya tarik wisata yang sesuai dengan potensi dan budaya lokal serta mengedepankan nilai-nilai Islami</p>	<p>Tersedianya sarana pendukung wisata yang memadai</p>	<p>-</p>	<p>100%</p>	<p>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</p> <p>Program Desnitasi Pariwisata</p>	<p>Pilihan</p>	<p>Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga</p>
		<p>Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap PDRB</p>			<p>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</p> <p>Program Desnitasi Pariwisata</p>	<p>Pilihan</p>	
<p>Meningkatnya investasi (PMDN dan PMA) dalam mendorong pemanfaatan SDA yang optimal dan perluasan penyediaan lapangan kerja</p>	<p>Peningkatan kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pelaku bisnis/dunia usaha/investor untuk berinvestasi di Kabupaten Nagan Raya</p>	<p>Realisasi nilai investasi PMDN</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Investasi</p>	<p>Wajib</p>	<p>Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal</p>

		Realisasi nilai investasi PMA	-	-	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Investasi		
		Jumlah Investasi PMDN (proyek)	-	-	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Investasi		
		Jumlah Investasi PMA (proyek)	-	-	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Investasi		
		Menurunnya Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	-	-	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Wajib	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Meningkatnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis sumber daya lokal dan ramah lingkungan	Pengembangan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan (UMKM) berbasis sumber daya lokal dalam mendorong percepatan ekonomi rakyat	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (unit)	1.044	3.544	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Wajib	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Perkoperasian
		Persentase koperasi aktif	30,69	46,66	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri		
		Jumlah Anggota Koperasi	6.282	9.282	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial		
					Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Industri		
					Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UKM		
					Program Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif		

Berkembangnya industri pengolahan yang mendukung pemanfaatan sumberdaya lokal dan berbasis pembangunan berkelanjutan	Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian yang didukung pemantapan dan integrasi dari subsistem hulu, subsistem hilir, dan fasilitas pendukung	Pembangunan industri CPO	-	100%	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Wajib	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Perkoperasian
		Berkembangnya industri pengolahan karet	-	100%	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		
		Berkembangnya industri pengolahan kakao	-	100%	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		
Terciptanya kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang serta adanya sinkronisasi rencana tata ruang dengan rencana pembangunan, baik antarsektor maupun antarwilayah	Peningkatan pengawasan secara berkelanjutan untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang serta menjamin sinkronisasi rencana tata ruang dengan rencana pembangunan, baik antarsektor maupun antarwilayah	Qanun RTRW Kabupaten Nagan Raya	90%	100%	Program Perencanaan Tata Ruang	Wajib	Bappeda
		Tersedianya pradesign dan DED dalam mendukung penataan ruang	40%	100%	Program Perencanaan Tata Ruang	Wajib	Dinas Tata Kota dan Perumahan
		Efektifnya pemanfaatan ruang	42%	100%	Program Pemanfaatan Ruang	Wajib	Dinas Tata Kota dan Perumahan

Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan kualitas kinerja pelayanan air minum, limbah, dan persampahan	Cakupan pelayanan persampahan			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Wajib	Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dan kontinyu yang melibatkan peran aktif kelompok masyarakat, dunia usaha/swasta, LSM, dan lembaga pemerhati lingkungan hidup	Berkurangnya pencemaran lingkungan	50%	100%	Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Wajib	Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan kelembagaan pemerintah dalam upaya mitigasi bencana	Penguatan kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat dan menerapkan sistem peringatan dini yang efektif dalam upaya pengurangan risiko bencana yang terpadu	Meningkatnya partisipasi dan kesiapsiagaan masyarakat serta kelembagaan pemerintah dalam pengurangan bencana	-	100%	Program Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat (KKBM) Program Penanggulangan Bencana dan Kemanusiaan	Wajib	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

MISI 5 : Mewujudkan sektor agribisnis sebagai leading sector dalam mendorong penguatan ekonomi rakyat

Menurunnya jumlah penduduk miskin dan meningkatnya pendapatan per kapita secara bertahap dan berkesinambungan	Penguatan sinergi berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Pusat dalam upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan milenium (<i>Millenium Development Goals</i>)	Persentase penduduk miskin dari total penduduk	23,38%		Lintas SKPK	Wajib	Lintas SKPK
		Peningkatan pendapatan per kapita (Rp)	2,86 juta	3,94 juta	Program Lintas SKPK	Wajib dan Pilihan	Lintas SKPK
Menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) dipertanian dan perdesaan	Perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha melalui pengembangan sektor agribisnis dan penguatan ekonomi rakyat	Angka TPT	7,13%		Program Lintas SKPK	Wajib dan Pilihan	Lintas SKPK

<p>Meningkatnya akses petani terhadap permodalan, produksi, informasi, pemasaran terhadap sarana teknologi, dan</p>	<p>Pemberdayaan dan peningkatan akses petani terhadap permodalan, sarana produksi, teknologi, informasi, dan pemasaran yang berimplikasi signifikan terhadap peningkatan pendapatan petani secara berkesinambungan (<i>income generating</i>):</p>	<p>Akses petani terhadap sumberdaya produktif dan pemasaran</p>	<p>-</p>	<p>100%</p>	<p>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan</p> <p>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</p>	<p>Pilihan</p>	<p>Dinas Pertanian dan Peternakan</p>
<p>Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pertanian tanaman pangan dalam mendukung kecukupan dan ketahanan pangan daerah</p>	<p>Pemanfaatan lahan-lahan pertanian secara optimal guna mendorong peningkatan produktivitas hasil pertanian dan mendukung kebutuhan pangan</p>	<p>Produktivitas padi (ton/ha)</p>	<p>7-8</p>	<p>10</p>	<p>Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan</p> <p>Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan</p> <p>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</p> <p>Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan</p>	<p>Pilihan</p>	<p>Dinas Pertanian dan Peternakan</p>

		Peningkatan luas lahan (cetak sawah baru (ha)					
		Produksi jagung (ton)	1.853	2.853			
		Produksi kedele (ton)	3.299	4.299			
		Kontribusi sektor pertanian tanaman pangan terhadap PDRB	17,42%	18,42%			
Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas perkebunan unggulan sesuai potensi dan karakteristik wilayah	Pengembangan sektor perkebunan rakyat yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat	Produktivitas kelapa sawit (ton/ha)			Peningkatan Produksi Perkebunan dan Sumber Daya Petani dan Pelaku Agribisnis Program Pengembangan Agribisnis Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	Pilihan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		Produktivitas kakao (ton/ha)					
		Produktivitas karet (ton/ha)					
		Produksi kelapa sawit (ton)					

		Produksi kakao (ton)				
		Produksi karet (ton)				
		Share perkebunan dalam PDRB	26,83%	27,83%		

<p>Meningkatnya produksi perikanan darat dan laut dalam upaya pemanfaatan sumber daya perikanan yang optimal dan berimplikasi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat nelayan</p>	<p>Peningkatan kapasitas produksi perikanan darat dan laut dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan</p>	<p>Produksi perikanan darat dan laut (ton)</p>	<p>73,01</p>	<p>95,0</p>	<p>Program Pengembangan Budidaya Perikanan</p> <p>Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar</p> <p>Program Pengembangan Perikanan Tangkap</p> <p>Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan</p> <p>Program Pengembangan sarana & prasarana penyuluh perikanan</p> <p>Program Pengembangan dan Pembinaan Penyuluhan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Perikanan</p> <p>Program Pengembangan</p>	<p>Pilihan</p>	<p>Dinas Kelautan dan Perikanan</p>
<p>PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA</p>					<p>Pendataan dan Statistik Kelautan dan Perikanan</p>		<p>VII-29</p>

	Pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan yang ramah lingkungan dan berbasis pembangunan berkelanjutan	Produksi perikanan laut (ton)					
		Jumlah armada perikanan tangkap (unit)					
Meningkatnya kontribusi perikanan dan kelautan dalam struktur ekonomi daerah (PDRB)	Pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan yang ramah lingkungan dan berbasis pembangunan berkelanjutan	Share perikanan dan kelautan dalam PDRB	2,49%	2,54%		Pilihan	Dinas Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya populasi ternak dalam mendorong ketahanan pangan daerah	Pengembangan bibit ternak unggul dan peningkatan kapasitas peternak melalui perluasan akses terhadap sumber permodalan bagi pengembangan usaha dan akses informasi pasar serta penyuluhan teknis usaha peternakan secara berkelanjutan	Populasi sapi (ekor)			Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pilihan	Dinas Pertanian dan Peternakan

		Populasi kerbau (ekor)			Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pilihan	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Populasi kambing (ekor)			Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pilihan	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Populasi ayam (ekor)			Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pilihan	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Populasi itik (ekor)			Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pilihan	Dinas Pertanian dan Peternakan

Meningkatnya kontribusi peternakan dalam struktur ekonomi daerah (PDRB)	Pengembangan bibit ternak unggul dan peningkatan kapasitas peternak melalui perluasan akses terhadap sumber permodalan bagi pengembangan usaha dan akses informasi pasar serta penyuluhan teknis usaha peternakan secara berkelanjutan	Share peternakan dalam PDRB	8,21%	9,21%		Pilihan	Dinas Pertanian dan Peternakan
Meningkatnya kontribusi subsektor kehutanan dalam PDRB	Penggalan potensi hasil hutan non kayu (<i>non timber forest product</i>) secara optimal dalam upaya pemberdayaan masyarakat disekitar hutan dan mendukung pelestarian fungsi hutan secara berkelanjutan	Share perkebunan dalam PDRB	4,67%	5,17%	Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Hutan Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Pilihan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Meningkatnya kapasitas koperasi dan UMKM berbasis agribisnis dalam mendorong perekonomian daerah dan penguatan ekonomi rakyat	Pengembangan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan (UMKM) berbasis agribisnis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan lapangan kerja, dan percepatan ekonomi rakyat	Jumlah koperasi aktif (unit)	30,69	40,66	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Wajib	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Perkoperasian
		Jumlah koperasi yang mendapat pembinaan (unit)	-	100%		Wajib	
Berkembangnya pusat-pusat perdagangan dalam mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan penguatan ekonomi rakyat	Pengembangan dan penataan pusat-pusat perdagangan dalam mendorong peningkatan aktivitas perdagangan dan kontinuitas jalur distribusi barang dan jasa	Pembangunan dan penataan Pasar Simpang Empat	-	100%	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Pilihan	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Perkoperasian
Meningkatnya kualitas infrastruktur yang integratif dan mendukung pengembangan sektor agribisnis dan penguatan ekonomi rakyat	Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang integral dan terpadu sebagai upaya mendorong pengembangan wilayah serta kelancaran arus mobiltas orang dan distribusi barang dan jasa	Panjang ruas jalan Kabupaten dalam kondisi baik	57,54%	87,54%	Program Peningkatan Jalan	Wajib	Dinas Bina Marga

	Peningkatan pemeliharaan dan perbaikan jalan dan jembatan dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan transportasi darat yang efisien, ekonomis, dan aman	Prosentase Pembangunan ruas jalan/rehab	20%	100%	Program Peningkatan Jalan	Wajib	Dinas Bina Marga
		Prosentase Pembangunan jembatan/rehab	20%	100%	Program Pembangunan Jembatan	Wajib	Dinas Bina Marga
	Penyediaan sarana dan prasarana dasar yang memadai melalui perluasan cakupan program PNPM mandiri perdesaan dan berbasis masyarakat	Panjang irigasi dalam kondisi baik	16,62%	21,62%	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Wajib	Dinas Pengairan
		Pembangunan jaringan irigasi			Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Wajib	Dinas Pengairan
<p>MISI 6 : Mewujudkan Bandara Cut Nyak Dien sebagai gerbang udara masuknya wisatawan domestik dan asing di kawasan barat-selatan Aceh</p>							

Meningkatnya sarana dan prasarana bandara Cut Nyak Dien dalam mendukung Bandara perintis di wilayah barat-selatan Aceh	Peningkatan sarana, prasarana transportasi dan keamanan serta kenyamanan bagi pengguna jasa Bandara Cut Nyak Dien	Meningkatnya panjang lintasan bandara (meter)			Program Pengembangan Bandara Program Peningkatan Bandara	Wajib	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
Terwujudnya pelayanan perhubungan udara yang cepat, ekonomis, dan efisien	Peningkatan kualitas pelayanan transportasi udara yang efektif dan efisien sebagai gerbang udara masuknya wisatawan domestik dan asing	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jasa transportasi udara	-	80%	Program Peningkatan Bandara		
		Meningkatnya trip/frekuensi penerbangan di Bandara Cut Nyak Dien			Program Peningkatan Bandara		
		Meningkatnya bongkar barang di bandara Cut Nyak Dien			Program Peningkatan Bandara		
		Meningkatnya Muat barang di bandara Cut Nyak Dien			Program Peningkatan Bandara		
Meningkatnya wisatawan domestik dan asing yang berkunjung ke Kabupaten Nagan Raya melalui Bandara Cut Nyak Dien		Meningkatnya arus masuk orang di bandara Cut Nyak Dien	8.314 orang		Program Peningkatan Bandara		

